**Tinjauan Yuridis Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam
Monitoring Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia**

Oleh : Ferris Sustiawan

Pembimbing I : Dr. Erdianto Efendi, S.H., M.Hum

PembimbingII : Dr. Mexsasai Indra, SH., M.H

Alamat: Jln. Srikandi Gg. Bayu, Kel. Delima Kec. Tampan Pekanbaru

Email: Feris_sst17@yahoo.co.id–tlpn: 081236644153

ABSTRACT

Combating Corruption Commission (KPK) is a special institution established as an institution for combating corruption is formed by Act No. 30 of 2002 on the Corruption Eradication Commission. The Commission has the authority that an arbitrary one of the main organizers is to monitor the state government. Monitoring is an activity that is carried out to check the appearance of the activity that is being done. Sector Monitoring Commission, in charge of running the oversight of government agencies, especially that could affect the growth or shrinkage of the corruption perception index. commission work together with the Commission's internal watchdog agency to talk about how to create an effective supervision. Internal watchdog agency is spearheading the supervision of an institution or department. They are expected to be able to detect irregularities in advance or even prevent the occurrence of financial irregularities.

Keywords: Authority - Monitoring - Combating Corruption Commission (KPK).

A. Pendahuluan

Perbuatan korupsi yang merajalela, merupakan bentuk perlawanan terhadap hukum yang dilakukan oleh sebagian komunitas atau sebagian kecil anggota masyarakat tertentu yang berlindung dibalik kekuasaan atau kewenangan guna kepentingan pribadinya dengan cara merugikan keuangan negara.¹ Memang, persoalan korupsi telah menjadi bagian sejarah yang tidak terpisahkan dari perjalanan bangsa Indonesia dalam mengisi era proklamasi kemerdekaan. Penggerogotan terhadap keuangan negara demi kepentingan individu atau kelompok tertentu telah terjadi sejak Indonesia diproklamasikan sebagai negara berdaulat. Peristiwa korupsi seolah telah menjadi bagian perilaku budaya yang menyimpang pada banyak tatanan lembaga birokrasi pemerintahan dan negara, sekaligus merugikan negara dan rasa keadilan kesejahteraan bagi rakyat.²

Strategi pemberantasan korupsi yang kurang komprehensif, yaitu lebih memberi perhatian kepada tindakan represif, turut pula mempengaruhi. Apalagi jika tindakan represif yang dilakukan bersifat setengah hati, tentu tidak akan efektif memerangi korupsi. Tindakan represif yang sangat

tegas dan konsisten perlu dibarengi dengan langkah-langkah preventif memperbaiki sistem manajemen pemerintahan, peningkatan pengawasan, perbaikan standar pelayanan publik, transparansi, dan keterbukaan administrasi pemerintahan, dan akuntabilitas publik sebagai bagian dari pembangunan *good governance*.³

KPK mempunyai kewenangan khusus yang diberikan oleh undang-undang yang berfungsi sebagai kewenangan pengawasan terhadap para penyelenggara pemerintahan negara, kewenangan itu adalah kewenangan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara. Kewenangan ini diatur dalam pasal 6 huruf (e) dan pasal 14 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Namun undang-undang ini masih mempunyai beberapa kelemahan, seperti masih belum jelasnya pengaturan tentang monitor ini, dan tidak adanya aturan lebih lanjut atau aturan dibawahnya seperti Peraturan Pemerintah (PP) dan masih adanya Kelemahan-kelemahan KPK lainnya dalam memonitor penyelenggara pemerintah negara di Indonesia.

Berdasarkan latar belakang diatas maka menarik untuk diteliti yang dituangkan dalam bentuk proposal skripsi dengan judul: **“Tinjauan Yuridis Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi**

¹ Ismail Prabowo, *Memerangi Korupsi Dengan Pendekatan Sosiologis*, Surabaya: Dharma Wangsa Media Press, 1998, hal. 26.

² Aswanto Budiharjo, *Perilaku Menyimpang Budaya Korupsi*, Jakarta : Grafindo Press, 2001, hal. 59.

³ Oka Mahendra, *Merajut Benang Yang Kusut*, Jakarta: Pancur Siwah, 2003, hal. vi.

**dalam Monitoring
Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi di Indonesia ”**

B. Rumusan Masalah :

1. Bagaimanakah Kewenangan Monitoring Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia ?
2. Apa Sajakah Kelemahan yang dihadapi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam Monitoring Tindak Pidana Korupsi di Indonesia ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui Kewenangan Monitoring Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia.
- b. Untuk mengetahui Kelemahan yang dihadapi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam Monitoring Tindak Pidana Korupsi di Indonesia.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah pengetahuan penulis khususnya dan para pembaca umumnya dalam hal terkait kewenangan komisi pemberantasan korupsi (KPK), dalam monitoring pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia.
- b. Memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum

pada umumnya, dan khususnya kepada institusi komisi pemberantasan korupsi (KPK), dalam memonitoring

pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia.

- c. Penelitian ini sebagai sumbangan dan alat pendorong bagi rekan-rekan mahasiswa untuk melakukan penelitian selanjutnya terkait kewenangan komisi pemberantasan korupsi (KPK) dalam monitoring pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia.

D. Kerangka Teori

1. Teori Kewenangan

Menurut Joseph Raz, dalam hal mengapresiasi hukum positif justru lebih berorientasi pada otoritas atau kewenangan. Menurutnya Suatu pendekatan yang lebih menjanjikan terhadap kenormatifan hukum yang dikemukakan dalam teori Joseph Raz tentang otoritas (kewenangan), yang juga dihubungkan dengan teori tentang kenormatifan hukum, sehingga menghasilkan kesimpulan penting yang berkaitan dengan kondisi validitas hukum. Pokok pemikiran yang mendasar dari argumen Joseph Raz adalah bahwa hukum merupakan sebuah lembaga sosial otoritatif. Joseph Raz beranggapan bahwa, hukum adalah kewenangan de facto. Maka dari itu, keberadaan hukum yang diciptakan atau

undang-undang sebagai produk hukum harus dibuat oleh lembaga yang memiliki otoritas atau kewenangan yang sah.⁴

Diantara perundang-undangan yang menjadi landasan hukum terkait keberadaan lembaga komisi pemberantasan tindak pidana korupsi (KPK) yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) yang secara substansional mengatur kewenangan, tugas dan fungsi KPK dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia.⁵ Dan pengaturan tentang kewenangan monitoring yaitu pasal 6 huruf (e), dan pasal 14 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Lingkup kewenangan dan fungsi yang diemban KPK, merupakan legitimasi hukum atas nama kekuasaan negara, seperti halnya lingkup kewenangan administrasi negara yang diberikan peranan kepada bidang kekuasaan eksekutif, bidang kekuasaan yudikatif, serta bidang kekuasaan legislatif yang secara umum keseluruhan sumberdaya penyelenggaraan

administrasi ketatanegaraan maupun administrasi ketata pemerintahan tersebut lazim disebut sebagai aparatur negara.⁶

2. Teori Sistem Hukum (*Legal System Theory*)

Sistem merupakan suatu kesatuan yang terdiri dari unsur-unsur atau elemen yang saling berinteraksi satu sama lain, dalam sistem tidak menghendaki adanya konflik antar unsur-unsur yang ada dalam sistem, kalau sampai terjadi konflik, maka akan segera diselesaikan oleh sistem tersebut.⁷

Lawrence M.Friedman berpendapat bahwa sistem hukum senantiasa mengandung tiga komponen yaitu: *Structure*, *Substance*, dan *Legal Culture*.⁸

Mengenai *Structure*, Lawrence M.Friedman mengatakan sebagai berikut: Struktur, dalam sistem hukum merupakan kerangka, yang merupakan bagian yang bertahan paling lama yang memberikan bentuk tertentu dan batasan keseluruhan sistem hukum. Struktur sistem hukum terdiri dari unsur-unsur yang sejenis, misalnya institusi penegak hukum yang memiliki kewenangan penyidikan dan

⁴ Joseph Raz, p. dalam Syaiful Ahmad Dinar, *KPK & Korupsi (Dalam Studi Kasus)*, Cintya Press, Jakarta : 2012, hal. 69.

⁵ Syaiful Ahmad Dinar, *KPK & Korupsi*, Cintya Press, Jakarta : 2012, hal. 68.

⁶ *Ibid*, hal. 69.

⁷ Teguh Prasetyo, *Filsafat, Teori, dan Ilmu Hukum: Pemikiran Menuju Masyarakat yang Berkeadilan dan Bermartabat*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013, hal. 311.

⁸ Lawrence M.Friedman, dalam Syaiful Ahmad Dinar, *KPK & Korupsi (Dalam Studi Kasus)*, hal. 76.

penuntutan sebagai pihak lembaga yang diberi wewenang menerapkan hukum, secara struktural menyangkut mengenai lingkup kekuasaan atau batas-batas kewenangan. Unsur struktur, dapat dikaitkan dengan lembaga pembuat Undang-Undang, atau lembaga lain yang diberi wewenang untuk menerapkan hukum dan penegakan hukum.⁹

Komponen berikut dari sistem hukum adalah “Substansi,” menurut Lawrence M. Friedman : Substansi hukum, merupakan bentuk nyata yang dihasilkan oleh sistem hukum, baik berupa norma, dan pola perilaku masyarakat, yang dikenal dengan sebutan “hukum”, serta merupakan tuntutan yang harus dipenuhi dalam suatu sistem hukum. Bahwa produk hukum sekunder maupun primer guna pemberantasan tindak pidana korupsi harus dilaksanakan secara tegas dan normatif, termasuk sanksi yang harus diberlakukan jika terjadi pelanggaran.

Komponen ketiga dari sistem hukum adalah *legal culture* atau budaya hukum, menurut Lawrence M. Friedman : Budaya hukum merupakan nilai-nilai dari masyarakat terhadap hukum, memegang peranan penting untuk dapat mengarahkan perkembangan sistem hukum,

karena itu berkenaan dengan persepsi- persepsi, nilai-nilai, ide-ide, dan pengharapan masyarakat terhadap hukum.

Hukum akan berperan dengan baik manakala ketiga aspek subsistem yaitu struktur, substansi dan budaya hukum itu saling berinteraksi dan memainkan peranan sesuai dengan fungsinya, sehingga hukum akan berjalan secara serasi dan seimbang, sesuai dengan fungsinya. Ibarat seekor ikan, ia akan hidup dengan baik manakala ditunjang oleh kualitas air kolam yang baik dan makanan yang baik pula. Apabila ketiga subsistem hukum tidak berfungsi dengan baik, maka akan muncul problem dalam upaya memfungsikan hukum sebagai sarana pembaharuan dan pembangunan masyarakat itu sendiri.¹⁰

3. Teori Fungsional

Menurut J. Ter Heide, berdasarkan ajaran teori fungsional, bahwa berfungsinya hukum dapat dipahami sebagai pengartikulasian (produksi/hasil) suatu hubungan yang ajeg itu disajikan dengan rumus “B : FPE”. Artinya bahwa perilaku yuris, hakim, pembentuk undang-undang (B) berada dalam suatu hubungan yang ajeg (F) terhadap disatu pihak berbagai kaidah hukum (P)

⁹ Syaiful Ahmad Dinar, *Op.cit*, hal. 77.

¹⁰ Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum Dan Pembangunan (Kumpulan Karya Tulis)*, Bandung: Alumni, 2003, hal . 3.

dilain pihak lingkungan-lingkungan konkret.¹¹

Dalam pemanfaatan teori hukum fungsional ini, telaahnya lebih terfokus pada keterkaitan kewenangan dan fungsi suatu institusi (KPK), seperti yang dikehendaki undang-undang. Apabila kita menganalisis teori ini, hukum dilihat dari aspek fungsi atau kegunaannya. Para yuris, hakim, pembentuk undang-undang dalam menjalankan perannya masing-masing harus memberikan mamfaat atau kegunaan bagi masyarakat banyak.¹² KPK, sebagai salah satu lembaga penegak hukum, yang diperintah oleh undang-undang, menjadi subjek sekaligus objek dalam suatu struktur birokrasi sistem peradilan pidana terpadu.¹³

E. KerangkaKonseptual

1. Tinjauan adalah suatu peninjauan, pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki dan mempelajari) atau perbuatan meninjau.¹⁴
2. Yuridis adalah menurut hukum atau secara hukum.¹⁵
3. Wewenang adalah hak dan kekuasaan untuk bertindak.¹⁶

¹¹ H. Salim Hs, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, Jakarta : Rajawali Pers, 2012, hal.73.

¹² *Ibid*.

¹³ Syaiful Ahmad Dinar, *Op.cit*, hal. 90.

¹⁴ Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Prima Media, Surabaya, 1996, hal. 487.

¹⁵ *Ibid*, hal. 541.

¹⁶ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa , Kamus Besar Bahasa Indonesia,

4. Monitoring adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengecek penampilan dari aktivitas yang sedang dikerjakan.¹⁷

5. Komisi pemberantasan korupsi (KPK) adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.¹⁸

6. Tindak pidana korupsi adalah tindakan yang secara melawan hukum, memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara.¹⁹

7. Pemberantasan tindak pidana korupsi adalah serangkaian tindakan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penuntutan, dan pemeriksaan disidang pengadilan, dengan peran serta masyarakat berdasarkan undang-undang yang berlaku.²⁰

F. MetodePenelitian

1) JenisPenelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini

Edisi 3, Balai Pustaka, Jakarta : 2002, hal.. 1272.

¹⁷ Soekartawi, *Monitoring dan Evaluasi Proyek Pendidikan*, Jakarta: PT Dunia Pustaka Jaya, 1995, hal. 10.

¹⁸ Pasal 3, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

¹⁹ Pasal 2, Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 199 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

²⁰ Pasal 1 ayat (3), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum dengan melakukan kajian terhadap bahan-bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan dan kajian buku-buku atau bahan pustaka yang ada. Dalam penelitian hukum normatif ini penulis melakukan penelitian terhadap asas-asas hukum yang bertitik tolak dari bidang-bidang tata hukum tertentu, dengan cara mengadakan identifikasi terdahulu terhadap kaidah-kaidah hukum yang telah dirumuskan dalam perundang-undangan tertentu.²¹

2) Sumber Data

Dalam penelitian hukum normatif sumber datanya adalah data sekunder. Data sekunder dalam penelitian ini dapat dibedakan menjadi tiga :

a. Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat berupa peraturan-peraturan perundang-undangan Indonesia, peraturan perundang-undangan negara lain, dan konvensi-konvensi Internasional. Peraturan perundang-undangan yang meliputi :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946

Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

4. Undang-undang republik indonesia nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang erat kaitanya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa, memahami, dan menjelaskan bahan hukum primer yang antara lain adalah teori para sarjana, buku, artikel internet, artikel ilmiah, jurnal, tesis, surat kabar, dan makalah.

c. Bahan Hukum Tertier

Yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan atas hukum primer dan sekunder,

²¹Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo, Jakarta: 2003, hal. 23.

misalnya ensiklopedi, kamus hukum, dan sebagainya.²²

3) Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data untuk penelitian normatif (*legal research*) digunakan metode kajian kepustakaan atau studi dokumenter. Sehingga data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder.

4) Analisis Data

Dalam penelitian normatif, pengolahan data hakikatnya kegiatan untuk mengadakan sistemasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis.²³ Analisis yang dilakukan adalah analisis data secara kualitatif yaitu bertujuan memahami, menginterpretasikan, mendeskripsikan suatu realitas. Penulis menarik kesimpulan secara deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat khusus, dimana kedua fakta tersebut dijumpai oleh teori-teori.

G. Pengaturan tentang Kewenangan Monitoring Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia

Monitoring adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengecek penampilan dari

aktivitas yang sedang dikerjakan.²⁴

Kewenangan KPK lahir dari Undang-Undang, dan Kewenangan monitoring merupakan salah satu kewenangan yang dimiliki oleh KPK sebagai institusi yang dilahirkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan dalam hukum positif Indonesia kewenangan monitoring ini diatur dalam pasal 6 huruf (e) dan pasal 14 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Lingkup kewenangan dan fungsi yang diemban KPK, merupakan legitimasi hukum atas nama kekuasaan negara, seperti halnya lingkup kewenangan administrasi negara yang diberikan peranan kepada bidang kekuasaan eksekutif, bidang kekuasaan yudikatif, serta bidang kekuasaan legislatif yang secara umum keseluruhan sumberdaya penyelenggaraan administrasi ketatanegaraan maupun administrasi ketata pemerintahan tersebut lazim disebut sebagai aparatur negara.²⁵

H. Kewenangan KPK dalam Melakukan Monitor Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Negara.

Dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, KPK memiliki fungsi Melakukan Monitor terhadap

²² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press 1986, hal. 50-51.

²³ Darmini Rosa, "Penerapan Sistem Presidensial dan Implikasinya dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara Indonesia" *Jurnal Ilmu Hukum*, Menara Yuridis, Edisi III, 2009, hal. 71.

²⁴ Soekartawi, *Loc cit*, hal. 10.

²⁵ *Ibid*, hal. 69.

penyelenggaraan pemerintahan negara. Hal ini bertujuan untuk mengawasi kinerja aparatur pemeritahan, sehingga tidak timbul kejahatan korupsi. KPK juga memiliki tugas untuk melakukan tindakan pencegahan kejahatan korupsi. Strategi pemberantasan korupsi adalah harus dicari dulu penyebabnya, kemudian penyebab itu dihilangkan dengan cara preventif disusul dengan pendidikan (kesadaran hukum) masyarakat serta dengan gerakan represif atau strategi pemberantasan korupsi bentuk piramida yang pada puncaknya preventif (pencegahan) sedang kepada kedua sisinya masing-masing pendidikan masyarakat (*punishment*).²⁶ Maka dari itu, diperlukanya suatu upaya monitoring dengan cara KPK dalam hal ini turun langsung ke lapangan, seperti ke setiap daerah di Indonesia, memonitoring langsung penyelenggaraan pemerintahan daerahnya, agar KPK dapat langsung mengetahui dan memperoleh informasi tentang sebab timbulnya korupsi di daerah, modus operandi, serta bentuk-bentuk korupsi, maka dapat dilakukan penegakan hukum, baik secara refresif, maupun preventif.

Perlunya monitoring atau pemantauan secara terus menerus dilakukan yaitu bahwa pengalaman menunjukkan bahwa, misalnya korupsi dalam tubuh

kepolisian, tidak cukup hanya membersihkan unit yang korup. Bila tidak ada proses pemantauan yang terus-menerus, cepat atau lambat akan timbul lagi korupsi dalam unit ini atau unit itu, untuk itu diperlukan lagi upaya yang sungguh-sungguh untuk membersihkannya. Tidak cukup hanya menyingkirkan pewira yang korup, peluang untuk melakukan korupsi juga harus disingkirkan, dan pewira-pewira yang jujur ditunjuk untuk menduduki jabatan-jabatan kepercayaan. “uji integritas” dapat membantu kita untuk mengidentifikasi perwira-perwira yang jujur untuk mempertimbangkan untuk kenaikan pangkat.²⁷

I. Pengkajian Terhadap Sistem Pengelolaan Administrasi Disemua Lembaga Negara dan Pemerintah.

Kajian dan monitoring yang telah dilakukan oleh KPK selama tahun 2013 meliputi kegiatan :²⁸ Kajian Seleksi Calon Praja IPDN 2013, Kajian Sektor Kesehatan Pada 2014, Kajian Kebijakan Efektivitas Program Subsidi Beras untuk Masyarakat Berpendapatan Rendah (RASKIN), Kajian kebijakan Sektor Sumberdaya Alam (SDA), Kajian Sistem Penggajian PNS, Kajian Perpajakan (Tim Lintas), Korsup/Tim Lintas Migas, Korsup/Tim Lintas BMN (Barang

²⁶http://www.kejaksaan.go.id/unit_kejaksaan.php?idu=28&idsu=39&idke=0&hal=1&id=1405, diakses, tanggal 21 Januari 2015.

²⁷ Jeremy Pope, *setrategi Memberantas Krupsi : Elemen Sistem Integritas Nasional*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2003, hal. 538.

²⁸ Laporan Tahunan KPK Tahun 2013, hal. 139-143.

Milik Negara), Korusup Pencegahan Kerja sama KPK dengan BPKP, Persiapan Fraud Control Plan (FCP), Pengembangan Materi Pilkada Berintegritas, Kajian Penguatan Sistem Politik. Merupakan usaha-usaha yang dilakukan oleh KPK untuk mengontrol dan memonitoring kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh penyelenggara pemerintah negara yang dianggap bisa mendapat perhatian dari masyarakat luas dan dapat berdampak terhadap kepentingan nasional, apalagi jika telah ada laporan-laporan dari masyarakat sebelumnya tentang kecurangan-kecurangan pada suatu kebijakan tertentu yang dibuat oleh penyelenggara pemerintah negara. Dan juga hal ini sesuai dengan Road Map KPK. Road Map KPK yang dimaksudkan untuk memberi arah pemberantasan korupsi yang akan dilakukan KPK dalam jangka panjang dalam rangka untuk Penanganan Kasus yang dianggap *Grand Corruption*. Pengertian *Grand Corruption* adalah tindak pidana korupsi yang memenuhi salah satu atau lebih kriteria berikut :

1. Melibatkan pengambil keputusan terhadap kebijakan atau regulasi
2. Melibatkan aparat penegak hukum
3. Berdampak luas terhadap kepentingan nasional
4. Kejahatan sindikasi, sistemik, dan terorganisir.
5. Penguatan APGAKUM dilakukan melalui Koordinasi dan Supervisi.

J. Saran Kepada Pimpinan Lembaga Negara dan Pemerintah Berdasarkan Hasil Pengkajian Sistem Pengelolaan Administrasi

Di tingkat daerah, KPK terus melakukan monitoring dan evaluasi terhadap tata kelola pemerintahan yang baik, berdasarkan studi mengenai pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik dengan cara memotret secara langsung pengalaman empirik yang dilakukan oleh Pemkab Jembrana, Pemkot Denpasar, Pemkot Yogyakarta, Pemkot Pekanbaru, dan Pemkot Gorontalo. Laporan hasil monitoring dan evaluasi implementasi tata kelola pemerintahan yang baik, yang berisi saran perbaikan dari KPK, telah dikirimkan ke lima pemkot tersebut untuk ditindak lanjuti melalui pembuatan *action plan* yang nantinya akan diverifikasi dan dipantau implementasinya. Lainnya adalah pelaksanaan program *The Support To Indonesia's Islands Of Integrity Program for Sulawesi (SIPS)*. Yang bertujuan untuk meningkatkan *good governance* pemerintah daerah (pemda) dalam rangka upaya pencegahan korupsi di tingkat pemda di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Utara, berfokus terutama pada perbaikan layanan publik, layanan pengadaan, dan manajemen kinerja pemerintah daerah. Pada Agustus 2010, *Canadian International Development Agency (CIDA)* dan KPK telah melakukan *Inception Mission* di kedua provinsi tersebut dalam

rangka diseminasi dan persiapan keikutsertaan daerah dalam program SIPS. Program SIPS ini dibiayai oleh hibah dari Pemerintah Kanada melalui CIDA dengan nilai sebesar 11 juta dolar Kanada, dengan kurun waktu selama 5 tahun sebagaimana tertuang dalam *memorandum of understanding* (MoU) antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Kanada yang telah ditandatangani pada 14 Mei 2009.²⁹

K. Laporan Kepada Presiden Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan Badan Pemeriksa Keuangan, Tentang Saran Pemberantasan Korupsi

Pemanfaatan Hasil Monitoring, yaitu data yang telah terkumpul dari hasil pemantauan harus secepatnya diolah dan dimaknai sehingga dapat segera diketahui apakah tujuan pelaksanaan program tercapai atau tidak. Pemaknaan hasil pemantauan ini menjadi dasar untuk merumuskan langkah-langkah berikutnya dalam pelaksanaan program. Jika perlu perubahan, perubahan apa dan bagaimana rancangannya. Jika tidak ada hal mendasar yang memerlukan perubahan, mungkin masih dapat pula dirumuskan bagian mana dari rancangan program yang memerlukan perhatian lebih banyak sehingga aspek-aspek program yang sudah

baik dapat menjadi lebih baik lagi.³⁰

Upaya monitoring dan pengkajian terhadap sistem pengelolaan administrasi disemua lembaga negara dan pemerintah serta setelah adanya upaya KPK untuk memberikan saran kepada pimpinan lembaga negara dan pemerintah untuk melakukan perubahan jika berdasarkan hasil pengkajiian, sistem pengelolaan administrasi tersebut berpotensi korupsi namun usulan tersebut tidak diindahkan, maka KPK dalam hal ini dapat melakukan tindakan lainnya yaitu Melaporkan kepada Presiden Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan Badan Pemeriksa Keuangan, jika saran KPK mengenai saran kepada pimpinan lembaga negara dan pemerintah untuk melakukan perubahan jika berdasarkan hasil pengkajiian, sistem pengelolaan administrasi tersebut berpotensi korupsi dan usulan tersebut tidak diindahkan.

L. Kelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam Monitoring Tindak Pidana Korupsi di Indonesia.

Salah satu kelemahan dari pengaturan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ini adalah masih belum jelasnya pengaturan tentang kewenangan KPK dalam monitoring ini, serta tidak ada pengaturan dibawahnya seperti

²⁹ Laporan Tahunan KPK Tahun 2010

³⁰ <http://numrileardhiyari.blogdetik.com/2013/12/01/monitoring/>, Op.cit.

peraturan pemerintah (PP) atau keputusan lainnya. Tujuan Pengaturan yang jelas dan terperinci pada suatu produk undang-undang difungsikan untuk kejelasan tentang peraturan tersebut dan fungsi dari adanya atau dikeluarkannya peraturan tersebut, sehingga adanya kejelasan pengaturan dalam menjalankan, menjabarkan, atau merinci ketentuan khususnya ketentuan tentang monitoring KPK ini.

Beberapa bentuk kelemahan KPK lainnya seperti karena kurangnya jumlah anggota penyidik KPK dan anggaran yang sangat terbatas jumlahnya, seperti pernyataan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Busyro Muqoddas yang membeberkan kelemahan KPK : “Selain tidak didukung dengan anggaran, lembaga antirasuah itu juga tidak memiliki banyak pegawai yang bisa digerakkan. Pertama kantor, kedua anggaran Rp 900 (sembilan ratus) miliar untuk 1.200 (seribu duaratus) pegawai, dan keterbatasan itu membuat KPK sulit untuk menjangkau ke daerah. Meski begitu KPK tetap melakukan pencegahan dan pemberantasan korupsi. Cara KPK melakukan pencegahan dan pemberantasan korupsi, harus dilakukan dengan menggandeng instansi lainnya. Selain itu KPK juga masuk ke dalam dunia kampus. Kita belum bisa menjangkau ke daerah dengan keterbatasan itu. Pendekatan sistemik, independen dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

(BPKP) seluruh Indonesia dan kampus-kampus”.³¹

Diantara sekian banyaknya bentuk-bentuk kejahatan dibidang korupsi, maka seharusnya diperlukan penanganan yang serius yang didukung dengan anggaran dan kantor serta sarana dan prasarana yang juga memadai agar proses penyelidikan dan penyidikan serta pemantauan para penyelenggara pemerintah negara dan pemerintahan dapat dilakukan secara maksimal. karena Kejahatan korupsi kategorikan sebagai *extra-ordinary crime* (kejahatan luar biasa), dan karena itu perlu tindakan yang bersifat “luar biasa” juga dalam pemberantasan tindak pidana korupsi ini. Dan juga pemerintah dapat lebih memperkuat pengaturan tentang monitoring ini, apalagi pemberantasan secara represif yang selama ini dilakukan belum begitu membuat koruptor takut.

M. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan dalam bab-bab sebelumnya, maka kesimpulan dari penelitian ini adalah :

1. Kewenangan Kewenangan monitoring komisi pemberantasan korupsi merupakan kewenangan yang lahir berdasarkan pasal 6 huruf (e) dan pasal 14 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kewenangan monitoring ini Merupakan

³¹ <http://sumutpos.co/2014/10/87818/inilah-kelemahan-kpk-versi-busyiro/feed>,

kewenangan KPK yang bertugas menjalankan proses pengawasan terhadap instansi pemerintah terutama yang bisa mempengaruhi pertumbuhan atau penciutan indeks persepsi korupsi. Kewenangan monitoring ini Melakukan pengkajian terhadap sistem pengelolaan administrasi disemua lembaga negara dan pemerintah. Memberi saran kepada pimpinan lembaga negara dan pemerintah untuk melakukan perubahan jika berdasarkan hasil pengkajian, sistem pengelolaan administrasi tersebut berpotensi korupsi. Melaporkan kepada Presiden Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan badan pemeriksa keuangan, jika saran Komisi Pemberantasan Korupsi mengenai usulan tersebut tidak diindahkan. KPK juga dapat melakukan upaya Monitoring elektronik yang berupa penyadapan baik percakapan atau data elektronik lainnya yang di distribusikan secara elektronik kepada seseorang yang “diduga” melakukan tindak pidana korupsi.

2. KPK masih memiliki beberapa kelemahan dalam monitoring pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia, Faktor-faktor yang menjadi penyebab susah nya KPK dalam mencegah tumbuh dan berkembangnya tindak pidana korupsi di

Indonesia yaitu seperti masih lemahnya pengaturan tentang monitoring ini ditambah kelemahan KPK lainnya seperti masih kurangnya anggaran dan kantor, serta masih kurangnya pegawai (SDM). Pengawasan yang ada selalama ini dianggap masih belum cukup untuk mengawasi dengan efektif para penyelenggara negara di daerah diseluruh Indonesia.

N. Saran

1. Dengan berjalanya kewenangan monitoring ini diharapkan pengawasan terhadap penyelenggara pemerintah negara semakin ketat, dan dapat mencegah tindak pidana korupsi yang terus berkembang dan menekan jumlah kejahatan korupsi yang selama ini menempatkan Indonesia sebagai negara dengan tingkat korupsi yang tinggi i. Dan KPK hendaknya dengan kewenang yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu sebagai institusi yang khusus untuk memberantas korupsi harus secara efektif terus melakukan monitoring kepada penyelenggara pemerintah negara agar tindak pidana korupsi tidak terus tumbuh dan berkembang. KPK juga diharapkan dapat turun langsung ke daerah untuk memonitor langsung para penyelenggara pemerintah negara yang berada di daerah,

dan memonitor atas saran atau rekomendasi yang diberikan oleh KPK sebelumnya untuk melakukan perubahan jika berdasarkan hasil pengkajiian, sistem pengelolaan administrasi tersebut berpotensi korupsi serta apakah benar-benar dirubah atau diperbaiki, serta melaporkan kepada Presiden Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan badan pemeriksa keuangan, jika saran Komisi Pemberantasan Korupsi mengenai usulan tersebut tidak diindahkan.

2. Apabila pengaturan tentang monitoring belum jelas, maka Presiden bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) perlu melakukan perbaikan atau amandemen undang-undang nomor 30 tahun 2002 tentang komisi pemberantasan tindak pidana korupsi berupa menambahkan pasal-pasal yang memperkuat kewenangan monitoring komisi pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia, atau mengeluarkan peraturan dibawah undang-undang seperti peraturan pemerintah (PP), guna untuk memperkuat peran KPK dalam monitoring ini dan memperkuat pengawasan bagi penyelenggara pemerintah negara yang diduga melakukan tindak pidana korupsi. cukupnya anggaran, tersedianya kantor-kantor perwakilan di daerah Provinsi, serta pegawai (SDM) yang

cukup, maka akan meningkatkan kemampuan KPK dalam memonitor seluruh penyelenggara negara. sehingga dapat menekan tindak pidana korupsi di Indonesia serta tidak menempatkan nama Negara Indonesia sebagai negara yang tertinggi angka kejahatan korupsinya lagi.

O. Daftar Pustaka

A. Buku

- Budiharjo, Aswanto, 2001, *Perilaku Menyimpang Budaya Korupsi*, Grafindo Press, Jakarta.
- Dinar, Syaiful Ahmad, 2012, *KPK & Korupsi*, Cintya Press, Jakarta.
- Mahendra, Oka, 2003, *Merajut Benang Yang Kusut*, Pancur Siwah, Jakarta.
- H. Salim Hs, 2012, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Kusumaatmadja, Mochtar, 2003, *Konsep-Konsep Hukum Dan Pembangunan (Kumpulan Karya Tulis)*, Alumni, Bandung.
- Pope, Jeremy, 2003, *setrategi Memberantas Krupsi : Elemen Sistem Integritas Nasional*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Prabowo, Ismail, 1998, *Memerangi Korupsi Dengan Pendekatan Sosiologis*, Dharma Wangsa Media Press, Surabaya.

Prasetyo, Teguh, 2013, *Filsafat, Teori, dan Ilmu Hukum: Pemikiran Menuju Masyarakat yang Berkeadilan dan Bermartabat*, Rajawali Pers, Jakarta.

Soekartawi, 1995, *Monitoring dan Evaluasi Proyek Pendidikan*, PT Dunia Pustaka Jaya, Jakarta.

Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.

_____ dan Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo, Jakarta.

B. Undang-Undang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

C. Jurnal/Kamus

Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, 1996, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Prima Media, Surabaya.

Rosa, Darmini, 2009, "Penerapan Sistem Presidensial dan Implikasinya dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara

Indonesia" *Jurnal Ilmu Hukum*, Menara Yuridis , Edisi III.

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa , 2002, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi 3, Balai Pustaka, Jakarta.

D. Website

<http://numrileardhiyari.blogdetik.com/2013/12/01/monitoring/>.

<http://sumutpos.co/2014/10/87818/inilah-kelemahan-kpk-versi-busyiro/feed>.

http://www.kejaksaan.go.id/unit_kejaksaan.php?idu=28&idsu=39&idke=0&hal=1&id=1405.

E. Sumber Lainnya

Laporan Tahunan KPK Tahun 2010.

Laporan Tahunan KPK Tahun 2013.